



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

TAHUN
2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syaloom, Om Swasti Astu, Tabe Salam Ling Nalatai – Salam Sahujud Karendem Malempang, Salam Sejahtera.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas dilaporkan berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disamping itu juga menjadi alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Kapuas Tahun 2019.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi kinerja dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.

Perlu disampaikan pula bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini sebelum dilakukan pelaporan telah melalui proses Review oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas dan hasilnya disampaikan melalui Laporan Hasil Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Nomor 780/08/LHR/INSP.KPS/2020 tanggal 7 April 2020. Beberapa point atas rekomendasi telah dilakukan perbaikan dan tindak lanjut dalam narasi dan data yang dilaporkan, namun beberapa rekomendasi lainnya yang dikaitkan dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama serta perubahan dokumen perencanaan daerah akan dilakukan secara bertahap dalam tahun 2020 ini.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas serta masyarakat yang selalu memberikan dukungan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kapuas untuk menuju ke arah yang lebih baik. Demikian dan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syaloom, Om Santhi Santhi Santhi Om, Sahi Sahi Sahi.

Kuala Kapuas, 29 April 2020

BUPATI KAPUAS,



Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS INSPEKTORAT

Jl. Patih Rumbih No.80 Telp (0513) 22268 Fax. 21355 Kuala Kapuas

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Kapuas, 07 April 2020

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS



HERIOWO. SH., CFA

Pembina

NIP. 19640607 1998608 1 005

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019, maka terdapat 5 Tujuan dan 24 Sasaran. Dari 5 Tujuan dengan 9 Indikator tujuan diperoleh 2 indikator tujuan mencapai target dan 7 indikator tujuan dengan capaian diatas 90%. Sedangkan pada 24 Sasaran dengan 42 indikator sasaran diperoleh 25 indikator sasaran mencapai target serta terdapat 2 Indikator sasaran dengan capaian dibawah 50%. Namun secara umum capaian kinerja Tahun 2019 sangat baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja pada periode pemerintahan Tahun 2018-2023 yang akan datang diperlukan adanya koordinasi yang aktif. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sinergi dari seluruh perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki peran dan fungsi tersendiri namun tetap berkolaborasi dan berkerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas (APBD) mengalokasikan belanja sebesar Rp. 1.768.803.555.342,-. Anggaran belanja daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini lebih kecil dibandingkan Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 1.982.631.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.921.085.590.189,01. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.611.689.276.752 atau 91,12%.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Susunan Organisasi Perangkat Daerah	1
C. Kapasitas Aparatur Sipil Negara	3
D. Aspek Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisai Anggaran	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Permasalahan dan Saran Perbaikan	91
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Kapuas Tahun 2019	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Kapuas Tahun 2019	
3. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023	
4. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019	

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja menjadi garda terdepan pemerintah daerah menuju *good governance*. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas kinerja juga menjadi salah satu sasaran reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja dalam kerangka reformasi birokrasi dilaksanakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP. SAKIP secara umum bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pembangunan daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019. Laporan kinerja ini memberikan gambaran hasil pencapaian target kinerja dalam melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 merupakan laporan tahun ke 2 (dua) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018 - 2023. Laporan ini memuat realisasi capaian kinerja disertai dengan realisasi keuangan selama tahun 2019.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membentuk susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah yang telah dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas merupakan Sekretariat Daerah :
 - I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan 3 Bagian :
 - II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahkan 3 bagian :
 - III. Asisten Administrasi Umum yang membawahkan 3 bagian :
 - IV. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - V. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - VI. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
3. Sekretariat Korpri
4. Inspektorat Daerah

5. Dinas Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
 - d. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - e. Dinas Sosial
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Dinas Ketahanan Pangan
 - h. Dinas Pertanian
 - i. Dinas Tenaga Kerja
 - j. Dinas Transmigrasi
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - m. Dinas Lingkungan Hidup
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - o. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Perikanan
 - r. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - s. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Badan Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan diatas, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Wilayah kerja pemerintahan di Kabupaten Kapuas terbagi dalam 17 (tujuh belas) kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Ibu Kota Kecamatan
1	Kapuas Kuala	-	13	Lupak Dalam
2	Tamban Catur	-	10	Tamban Catur
3	Kapuas Timur	-	7	Anjir Serapat
4	Selat	8	2	Kuala Kapuas
5	Bataguh	1	14	Bataguh
6	Basarang	-	14	Basarang
7	Kapuas Hilir	5	3	Barimba
8	Pulau Petak	-	12	Sei Tatas
9	Kapuas Murung	2	21	Palingkau
10	Dadahup	-	13	Dadahup
11	Kapuas Barat	1	11	Mandomai
12	Mantangai	-	38	Mantangai Tengah
13	Timpah	-	9	Timpah
14	Kapuas Tengah	-	13	Pujon
15	Pasak Talawang	-	10	Jangkang
16	Kapuas Hulu	-	14	Sei Hanyo
17	Mandau Talawang	-	10	Sei Pinang

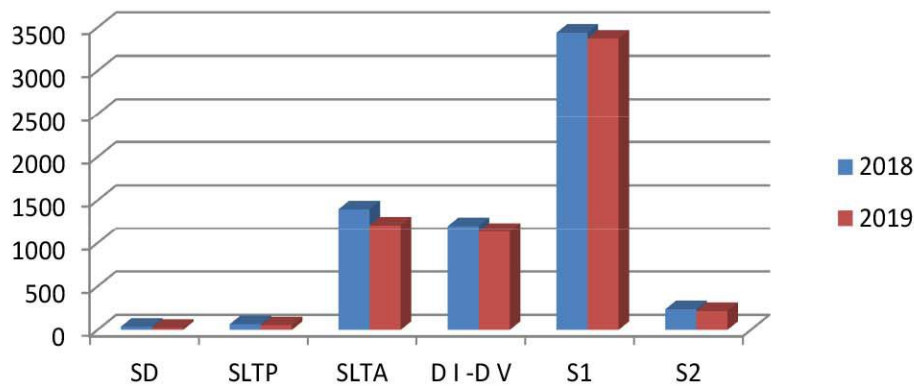
C. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6.014 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 6.109. ASN tersebut tersebar di seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas maka PNS didominasi oleh lulusan S1 dan S2 sebesar 59,69 persen atau sebanyak 3.590, diikuti lulusan SMA sebesar 20,11 persen dan lulusan Diploma sebesar 18,88 persen. Namun demikian masih ada lulusan SMP ke bawah sekitar 1,29 persen. Berikut jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan tingkat pendidikan.

Grafik 1.1

Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan tingkat pendidikan
Tahun 2018-2019



D. ASPEK STRATEGIS

Dalam memenuhi amanah rakyat dalam mewujudkan Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah ditetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019. Dalam merealisasikan target-target kinerja dalam dokumen perencanaan tersebut Pemerintah Daerah didukung oleh aspek-aspek strategis sebagai berikut.

a. Aspek Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada $0^{\circ} 8' 48''$ - $3^{\circ} 27' 00''$ LS dan $113^{\circ} 2' 36''$ - $114^{\circ} 44' 00''$ BT, secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni daerah sebelah utara (meliputi 6 Kecamatan) merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit sedangkan daerah selatan (meliputi 11 Kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan rawa-rawa. Dengan Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 14.999 Km² atau 9,77% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.2

Luas Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan

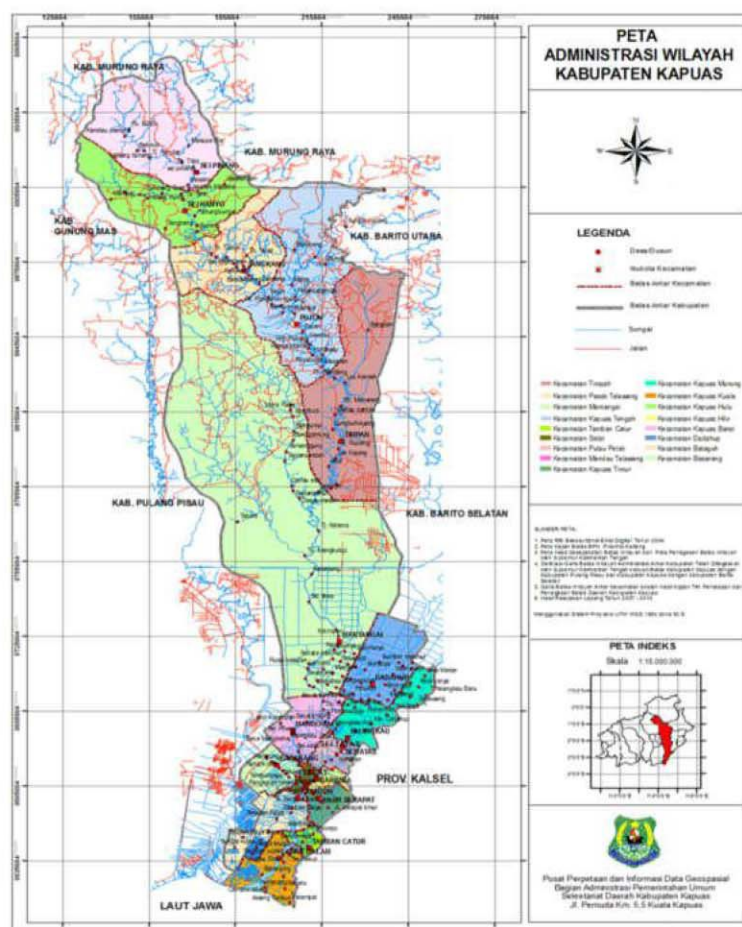
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase wilayah (%)
1	Kapuas Kuala	360,62	2,40
2	Tamban Catur	66,38	0,44
3	Kapuas Timur	202,00	1,35
4	Selat	111,74	0,74
5	Bataguh	282,26	1,88
6	Basarang	206,00	1,37
7	Kapuas Hilir	91,00	0,61
8	Pulau Petak	135,00	0,90
9	Kapuas Murung	288,45	1,92
10	Dadahup	202,55	1,35

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase wilayah (%)
11	Kapuas Barat	480,00	3,20
12	Matangai	6.128,00	40,86
13	Timpah	2.016,00	13,44
14	Kapuas Tengah	1.146,00	7,64
15	Pasak Talawang	687,00	4,58
16	Kapuas Hulu	1.274,00	8,49
17	Mandau Talawang	1.322,00	8,81
Kapuas		14.999	100

Secara geografis berada pada jalur utama lintas Trans Kalimantan yaitu jalur Kota Palangka Raya – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – Kota Banjarmasin. Batas-batas administratif daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah



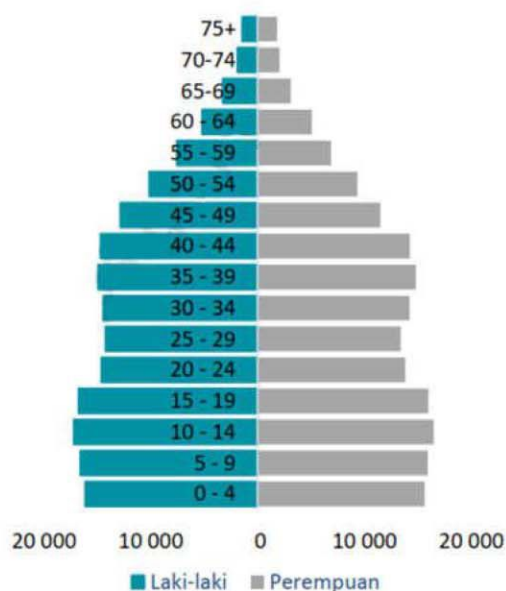
Secara yuridis formal, Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1820). Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan tuntutan untuk pemekaran wilayah, maka sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Kapuas (Kabupaten Induk), Kabupaten Pulang Pisau (Kabupaten hasil pemekaran) dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

Selain kondisi geografis wilayah, karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas meliputi Wilayah selatan (12 kecamatan) memiliki karakteristik pasang surut (rawa) yang berpotensi untuk lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sementara wilayah utara (5 kecamatan) dengan karakteristik berbukit-bukit sangat sesuai untuk lahan perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan.

b. Aspek Demografi Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tahun 2018 sebanyak 356,4 ribu jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan jumlah penduduk sebesar 353,8 ribu jiwa. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2018, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Grafik 1.2
Piramida Penduduk, 2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Selama periode 2016-2018, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat melambat dari 0,86 persen pada tahun 2016 menjadi 0,80 persen tahun 2017. Begitu juga pada pertengahan tahun 2018 mengalami perlambatan menjadi 0,72 persen. Dengan luas wilayah sekitar 14.999 km², maka setiap km² ditempati penduduk sebanyak 24 orang pada pertengahan tahun 2018.

Grafik 1.3

Indikator Kependudukan Kapuas, 2016-2018

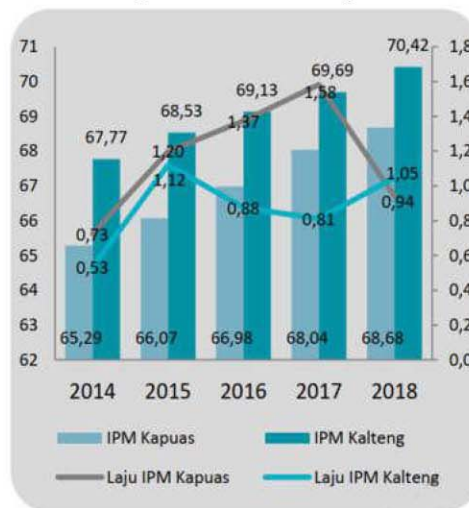
Uraian	Satuan	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	ribu jiwa	351,0	353,8	356,4
Pertumbuhan Penduduk	persen	0,86	0,80	0,72
Kepadatan Penduduk	jiwa/km ²	23	24	24
Sex Ratio (L/P)	persen	104	104	104
Jumlah Rumah Tangga	ribu rumah tangga	89,83	90,55	91,20
Rata-rata ART	jiwa/rumah tangga	4	4	4

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia (umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup layak) di Kabupaten Kapuas. Selama periode 2014-2018, IPM Kabupaten Kapuas selalu mengalami peningkatan. Meskipun rata-rata IPM Kapuas dalam lima tahun masih dibawah angka Kalimantan Tengah, namun sejak tahun 2014 pertumbuhan IPM di Kapuas selalu diatas pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah hingga tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah.

Grafik 1.4

Indeks Pembangunan Manusia Kapuas, 2014-2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

c. Aspek Ekonomi Daerah

Aspek ekonomi daerah Kabupaten Kapuas dapat diamati dari berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan per kapita dan indikator ekonomi lainnya. PDRB Kabupaten Kapuas sebagai salah satu komponen indikator kinerja pembangunan ekonomi makro menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahunnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kapuas menunjukkan kecenderungan positif dan di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Laju pertumbuhan PDRB Kapuas Tahun 2018 sebesar 7,01 persen, sedangkan tahun 2016 tumbuh sebesar 7,62 persen. Pada tahun 2018, PDRB Perkapita Kapuas mencapai 42,55 persen, dengan pertumbuhan perkapita sebesar 6,25 persen.

Grafik 1.5
Perkembangan PDRB Kapuas, 2016-2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Dilihat dari distribusi PDRB Kapuas, struktur ekonomi Kapuas ditopang oleh kategori pertanian sebesar 26,43 persen, disusul oleh kategori perdagangan 15,66 persen, kategori pertambangan sebesar 12,86 persen, dan kategori industri pengolahan sebesar 11,73 persen.

Grafik 1.6
Distribusi persentase PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019